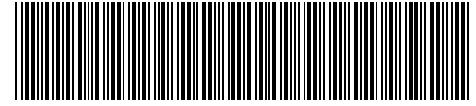




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 004.01.2.450799/2025**



DS:9528-1707-9977-4170

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2. Unit Organisasi : (01) Badan Pemeriksa Keuangan
3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (450799) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
- Sebesar : Rp. 65.157.158.000 (ENAM PULUH LIMA MILIAR SERATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA SERATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	Rp. 65.157.158.000
004.01.CI.1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Rp. 65.157.158.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	65.157.158.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDUNG I (022) Rp. 65.157.158.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (450799) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara			65.157.158.000		
Kegiatan	:	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara			65.157.158.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Pemenuhan Pengendalian dan pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan					
		2. 01	Tingkat kepuasan atas dukungan pengelolaan pemeriksaan					
		3. 01	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan					
		4. 02	Tingkat Pemenuhan Permintaan Investigasi dari Para Pemangku Kepentingan					
		5. 02	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan pengevaluasian atas hasil PTLRHP					
		6. 02	Tingkat pemenuhan keterlibatan Satuan Kerja dalam pemeriksaan tematik nasional					
		7. 03	Indeks Kepuasan IPH atas Kualitas Hasil Investigasi					
		8. 03	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para pemangku kepentingan					
		9. 03	Tingkat pemanfaatan atas hasil analisis isu strategis dan kebijakan pemeriksaan					
		10. 04	Tingkat Respon AUI terhadap Permintaan IPH (Penanganan Informasi Awal)					
		11. 04	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1043.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	35,00	Unit	312.245.000	
Rincian Output		:	01	CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	35.00	Unit	312.245.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.114.491.000	
Rincian Output		:	01	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	22.114.491.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	40,00	Unit, m2, Paket	822.355.000	
Rincian Output		:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	40.00	Unit	822.355.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (450799) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	1043.FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	486,00	Laporan, Pendapat Hukum, LHP, Bahan Pertimbangan, Pertimbangan	41.908.067.000
Rincian Output	:	01	FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	262,00	LHP	596.796.000
		02	FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1,00	Laporan	35.460.000
		03	FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	2,00	Laporan	146.000.000
		04	FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	28,00	Laporan	9.066.000
		05	FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	56,00	Laporan	2.205.128.000
		06	FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	56,00	Laporan	1.460.948.000
		07	FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12,00	Laporan	1.429.555.000
		08	FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	21,00	Laporan	3.509.471.000
		09	FAF.U19	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	48,00	LHP	32.515.643.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal BPK

ttd.
Bahtiar Arif
NIP 197005051990031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



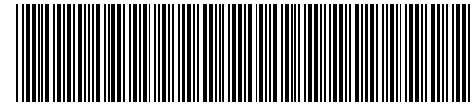
DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (450799) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
450799	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	14.947.137	49.075.421	1.134.600	-	-	65.157.158		
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	14.947.137	49.075.421	1.134.600	-	-	65.157.158		
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	14.947.137	49.075.421	1.134.600	-	-	65.157.158		
1043.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	-	312.245	-	-	312.245	02 . 51	
01	RM	-	-	312.245	-	-	312.245	022	
1043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	14.947.137	7.167.354	-	-	-	22.114.491	02 . 51	
01	RM	14.947.137	7.167.354	-	-	-	22.114.491	022@	
1043.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	-	822.355	-	-	822.355	02 . 51	
01	RM	-	-	822.355	-	-	822.355	022	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (450799) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1043.FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	41.908.067	-	-	-	41.908.067	02 . 51	
01 RM		-	41.908.067	-	-	-	41.908.067	022@	
JUMLAH		14.947.137	49.075.421	1.134.600	-	-	65.157.158		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal BPK

ttd.
Bahtiar Arif
NIP 197005051990031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : (004) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (450799) BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

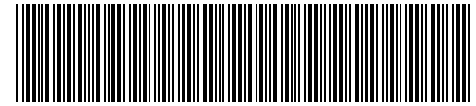
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	450799	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.806.685	7.000.754	3.866.333	7.780.980	6.668.316	6.597.184	3.098.513	3.554.444	5.108.503	7.139.991	7.705.620	4.829.836	65.157.158
		BELANJA PEGAWAI	953.367	1.111.879	2.051.512	1.098.145	1.098.145	2.051.512	1.098.145	1.084.411	1.070.677	1.070.677	1.070.677	1.187.992	14.947.137
		BELANJA BARANG	853.318	5.888.875	1.814.821	6.429.795	4.820.486	4.413.797	2.000.368	2.470.033	4.037.826	6.069.314	6.634.943	3.641.844	49.075.421
		BELANJA MODAL	0	0	0	253.040	749.685	131.875	0	0	0	0	0	0	1.134.600
	004.01.CI.1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1.806.685	7.000.754	3.866.333	7.780.980	6.668.316	6.597.184	3.098.513	3.554.444	5.108.503	7.139.991	7.705.620	4.829.836	65.157.158
		51 BELANJA PEGAWAI	953.367	1.111.879	2.051.512	1.098.145	1.098.145	2.051.512	1.098.145	1.084.411	1.070.677	1.070.677	1.070.677	1.187.992	14.947.137
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	853.318	5.888.875	1.814.821	6.429.795	4.820.486	4.413.797	2.000.368	2.470.033	4.037.826	6.069.314	6.634.943	3.641.844	49.075.421
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	253.040	749.685	131.875	0	0	0	0	0	0	1.134.600
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		- PNBP (425129)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal BPK

ttd.
Bahtiar Arif
NIP 197005051990031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : [004] BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [450799] BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
450799	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 16.383.978		
	52 Belanja Barang Rp. 16.383.978		
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara		
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara		
1043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 123.924		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.275		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1043.FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.535.221		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.270		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 497.288		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal BPK

ttd.
Bahtiar Arif
NIP 197005051990031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 004.01.2.450799/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9528-1707-9977-4170

Kementerian Negara/Lembaga : [004] BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pemeriksa Keuangan
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [450799] BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal BPK

ttd.
Bahtiar Arif
NIP 197005051990031001